**MARKETING POLITIK : PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019**

**Runik Machfiroh1; AMA Suyanto2**

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Telkom University, Jl Telekomunikasi Trs Buah Batu Bandung Jawa Barat

runikmachfiroh@telkomuniversity.ac.id; runik87@gmail.com

ama@telkomuniversity.ac.id; amasuyanto@gmail.com

**Abstract.** Marketing politik dalam pemilihan presiden tahun 2019 menjadi faktor utama dalam kemenangan sebagai salah satu pesta demorasi Indonesia. Brand personality dari kandidat calon presiden 2019 menjadi poin penting dalam kemenangan karena menjadi rival dalam pemilihan presiden dalam periode sebelumnya. Generasi millenial menjadi bagian dari konstituen pemilih pemula yang menjadi sasaran. Penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait pemetaan dan menganalisis marketing politik pada pimilihan presiden 2014, pemilihan legislatif 2014 dan pemilihan kepala daerah 2015 dimana dari setiap pemilihan terjadi perbedaan penekanan dalam marketing politik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis marketing politik pemilihan presiden tahun 2019 yang dapat menemukan keunikan dari marketing politik sebelumnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dengan analisis data deskriptif statistik. Populasi penelitian ini adalah pemilih pemula di Jawa Barat. Teknik sampling yang digunakan random sampling dengan total sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi pemula pada pemilihan presiden 2019 sebesar 100% menggunakan platform media digital dimana untuk mengetahui calon presiden dan untuk menambah pengetahuan dasar politik sebesar 80%. Namun, keputusan pemilihan presiden didukung media presiden ternyata menunjukkan tidak pernah sebesar 57.6%.

Kata Kunci: Marketing Politik, Partisipasi Politik, Pendidikan Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Presiden

**PENDAHULUAN**

Proses pemilihan umum memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Pemilihan umum adalah mekanisme utama yang mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat. Otoritas tertinggi terletak pada orang-orang yang mendelegasikan wewenang kepada perwakilan partai politik dalam proses pemilihan. Pemilu memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi menyalurkan hak suara atas kedaulatan yang dimiliki. Partisipasi dalam pemilu menjamin representasi yang setia dari kehendak rakyat dan dengan demikianmencegah distorsi. Partisipasi warga dalam pemilu menegaskan dukungan mereka untuk perubahan kehidupan berbegara maupun kehidupan dalam tatanan politik. Hal inimempromosikan bukan saja menstabilitas prosws politik warga, tetapi inheren diinginkan pada alasan normatif. Menurut teori demokrasi, hak untuk memilih dalam pemilihan tidak hanya dijamin secara universal, namun harus dilakukan untuk menjamin hak warga negaradalam berpolitik. Keterlibatan orang muda dalam berpolitik dapat mengambil berbagai bentuk, sepertihalnya kelompok usia lainnya. Pemilu hanya merupakan salah satu elemen dari repertoar partisipasi politik yang jauh lebih luas, dan tindakan demokratis paling mendasar yangharus dilakukan. Kaum muda harus memilih untuk memastikan keseluruhan jumlah.

Pemilih pemula dalam era digital atau generasi millenial memiliki suatu positioning tersendiri dalam marekting politik. Indonesia, apabila demokrasinya ingin maju dan beradab perlu pengelolaan khusus atau pendidiklan politik bagi pemilih pemula. Berbeda dengan demokrasi yang maju, tingkat partisipasi pemilih pemuda di negara-negara berkembang tampak lebih tinggi, kecuali Filipina di mana pemilihan kompetitif dan reguler telah diadakan sejak tahun 1992, tetapi kualitas pemerintahan terbukti mengecewakan. Partisipasi pemuda Mongolia yang tinggi terutama disebabkan oleh instalasi baru pemilihan demokratis. Bagi warga yang telah diperintah di bawah Soviet Mongolia, mekanisme demokratis baru yang menginspirasi mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam politik.

Pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk pemilihan presiden atau legislative baik pusat m,aupun daerah memberikan peluang terutama bagi pemilih pemula untuk membangun dan mengembangkan proses demokratisasi yang lebih segar dan menyenangkan. Dalam banyak kajian ditemukan partisipasi pemilih pemula yang didominasi kaum muda justru menurun. Kelompok muda ini cenderung tidak peduli terhadap perkembangan politik negerinya. Mereka cenderunglebih menyukai berartisipasi dalam politik egaliter yaitu melalui berbagai kegiatan sosial yang dipandangmemberikan dukungan sosial, moral kepada kelompok marginal. Untuk meraup suara pemilih pemula, diperlukan strategi khusus agar apa yang dilakukan kelompok muda bersinergi dengan kepentingan calon presiden dan wakil presiden. Penggunaan metode rekruitmen yang menghibur dan strategi multimedia untuk menarik perhatian kaum muda adalah salah satu pilihan dari banyak pilihan menarik yang dapat dipakai untuk menarik mereka menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Persoalan pemilih pemula memang bukan hanya persoalan Indonesia, beberapanegara termasuk Amerika Serikat memberikan porsi yang cukup besar dalam mengelola pemilih pemula yang dikuasai oleh para pemuda. Dimasukkannya pemuda dalam politik formal adalah penting, sebagaimana pemberontakan rakyat Amerika Serikat tahun 2011/2012 yang populer dan berbagai gerakan pendudukan telah ditunjukkan, membuat pemerintah dan partai politik memperhitungkan potensi pemuda ini. Ketika protes yang dipicu pemuda telah memaksa rezim otoriter dari kekuasaan, frustrasi yang signifikan kemungkinan akan muncul jika pemuda tidak termasuk dalam pengambilan keputusan formal baru. Ini dapat mengacaukan demokratisasi dan mempercepat dinamika konflik. Komunitas internasional telah mengakui pentingnya pemuda yang berpartisipasi dalam sistem politik, termasuk melalui beberapa konvensi internasional dan resolusi PBB. Sejalan dengan komitmen ini, UNDP memandang pemuda sebagai kekuatan positif untuk perubahan sosial transformatif, dan bertujuan untuk membantu meningkatkan partisipasi politik pemuda. Prinsip dasarnya adalah bahwa dukungan untuk partisipasi politik pemuda harus diperluas ke siklus pemilu. Pengembangan kapasitas untuk kandidat muda, telah terbukti lebih efektif sebagai upaya berkelanjutan daripada sebagai satu kali peristiwa tiga bulan sebelum pemilihan. Orang-orang muda yang berpartisipasi aktif di komunitas mereka sejak awal lebih mungkin menjadi warga yang terlibat dan pemilih.

Pemilih pemula selalu menjadi incaran partai politik. Pemilih pemula dikonstruksikan sebagai pemilih yang labil dan gampang untuk dipengaruhi. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan syarat sesorang menjadi pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahunatau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin. Dengan demikian seorang dikatakan sebagai pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun pada saat hari pencoblosan, belum pernah memilih, atau mereka yang sudah menikah atau pernah menikah walaupun belum mencapai usia 17 tahun dan belum pernah menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih pemula sebagaimana disebutkan oleh KPU cukup potensial, merekatersebar di seluruh pelosok dengan berbagai dinamika dan budaya yang beragam. Berdasarkan permasalah di atas, pemilih pemula diperlukan suatu formula dalam marketing politik agar tingkat partisipasi tinggi dan kualitas pemilu meningkat.

**METODE**

Pendekatan penelitian melalui kuantitatif. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan purposive sampling yaitu berdasarkan objek penelitian adalah pemilih pemula. Objek penelitian ini adalah para pemilih pemula yang telah menggunakan hak pilih yang pertama kali pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Bandung secara acak. Adapun sampel penelitian adalah mahasiswa Universitas Telkom yang merupakan pemilih pemula di Kota Bandung dari total populasi 215 mahasiswa tingkat awal berasal dari Kota Bandung, maka sampel yang diperoleh sebanyak 100 mahasiswa dengan penyebaran secara terbuka melalui google form.

**PEMBAHASAN**

Pengumpulan data melalui googleform untuk mengumpulkan data dari berbagai universitas di Indonesia. Kuesioner didistribusikan melalui online khususnya ig dan group whatsapp. Secara total, 100 responden digunakan untuk mengukur secara deskriptif partisipasi pemilih pemula. Kategori responden antara 17 hingga 24 tahun 100 % dengan pendidikan paling banyak yaitu 59% tingkat sarjana. Sebagian besar responden berasal dari keluarga kelas menengah (26,04%) dan keluarga kelas atas (29,95%) yang menunjukkan responden memiliki status keuangan yang baik sedangkan 10,94% responden memiliki pendapatan rendah per bulan. Sebagian besar tingkat pendidikan orang tua responden lebih tinggi dari sekolah menengah. Kemudian, responden dikelompokkan berdasarkan jenis media sosial. Dari total responden, 196 responden dipilih 3 hingga 5 jenis media sosial (51,04%), diikuti oleh responden yang memilih kurang dari 3 jenis media sosial dan lebih dari 5 jenis media sosial. Para responden lebih suka menggunakan Line, Blog untuk membaca berita tentang politik, diikuti oleh Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, dan Wikipedia. Selain itu, responden juga dikelompokkan berdasarkan durasi dalam menggunakan media sosial. Durasi terpanjang dalam menggunakan media sosial adalah di atas 2 jam ada 54,2%.

Instagram untuk melihat akun resmi politisi atau tentang berita politik. Aktivitas praktik politik di Instagram memberi tahu pengguna tentang gaya hidup mereka di mana menarik minat pengguna untuk melihat pos. Serupa dengan penelitian ini, studi sebelumnya menemukan pemilih pemula belum berpartisipasi katif secara offline, namun pnegetahuan politik meningkat dari media sosial. Berdasarkan hasil riset Schroeder dalam Machfiroh (2018) di empat negara yaitu Swedia, China, Amerika dan India tentang media dan politik menunjukkan bahwa adanya media digital telah meningkatkan pengetahuan warga negara karena media digital telah menjadi alat mediasi antar elit politik dan elit politik dengan warga negara. Hal ini diperkuat oleh pendapat Assard dan Bennet dalam Machfiroh (2018), bahwasanya media digital dalam dunia politik telah menjadi *marketplace of idea*. Begitu juga di Indonesia, hasil penelitian Suyanto and Machfiroh (2016) menunjukkan bahwa marketing politik dalam pemilihan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Indonesia sudah bergeser melalui media digital dan telah mempengaruhi keputusan pemilih pemula. Penggunaan informasi pada media sosial mendorong kegiatan partisipatif. Kegiatan pencarian informasi menciptakan kesadaran orang untuk berpartisipasi secara online & offline dalam politik. Dan juga, orang-orang yang membahas politik melalui offline dan online cenderung memiliki tingkat kemauan yang lebih tinggi untuk menerima risiko politik, sehingga mereka dapat dengan penuh perhatian terlibat berpartisipasi dalam politik baik online maupun offline. Diskusi online dan offline juga meningkatkan kesadaran orang dewasa muda untuk berpartisipasi dalam politik dan mengarahkan mereka untuk memantau pemerintah. Misalnya banyak orang muda bertanya tentang fasilitas Bandung atau masalah sosial di akun resmi Ridwan Kamil. Namun, diperkirakan berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa kepercayaan politik tidak memediasi hubungan antara pencarian informasi dan partisipasi politik online & offline di mana orang dewasa muda memiliki kepercayaan rendah terhadap berita dan informasi tentang politik melalui media sosial. Di Indonesia, banyak akun media sosial disajikan berita yang tidak benar dan beberapa di antaranya menimbulkan konflik sosial antara pengguna. Misalnya, berbagi media seperti Instagram, Facebook, dan YouTube menyediakan pengguna untuk secara bebas mengunggah semua konten politik yang mungkin mengandung informasi negatif dan palsu. Oleh karena itu informasi negatif online mungkin mengurangi kepercayaan politik orang dewasa muda.

Incaran Partai Politik terhadap pemilih pemula ini didasarkan pada kondisi pemilih pemula yang dianggap mampu diatur dan digiring dalam menentukan pilihannya. Sayangnya pola-polarekruitmen suara pemilih pemula oleh partai poltik acapkali tidak memperhatikan baik usia maupun dinamika para pemilih pemula. M. Rusli Karim (1991) memandang pemilih pemula yang sebagian besar adalah para pemuda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan diduga merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik. Pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai, hanya cenderung mengikuti tren dilingkungan tempat tinggalnya. Suhartono (2009). Mencatat pemilih pemula mempunyai nilai kebudayaan yangsantai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, dengan pemerintah harus mengembangkan aktivitas yang memungkinkan pemilih pemula mengejar bentuk politik mereka sendiri. Mereka tidak harus mengikuti bentuk-bentuk partisipasi politik yang dibentuk partai politik sehingga kebebasan mereka terbelenggu, namun harus mendorong dan mengilhami untuk mengejar bentuk partisipasi dan kegiatan mereka. Kegiatan tidak harus "politis", tetapi "saling menguntungkan". Dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai kebutuhan, mereka tidak hanya dapat membantu orang lain, tetapi juga memperoleh pemenuhan diri dari kontribusi mereka, sekaligus mengambil keputusan untuk memilih sesuai dengan aspirasi yang dikuasainya. Artinya suara itu akan melengkapi suara lain kepada partai politik yang mampu menguatkan keberdayaan mereka. Aktivitas kampanye partai politik harus memberi energi kepada pemilih pemula untuk terlibat dalam masalah sosial yang serius, membiarkan mereka untuk secara praktis membantu anak-anak yang membutuhkan dan memungkinkan sukarelawan muda untukmengobrol satu sama lain untuk berbagi pengalaman mereka. Kegiatan kampanye harus menginspirasi, pemilih pemula yang sebagian besar adalah anak-anak muda tidak hanya menjadi pendengar dan meramai kampanye, bahkan mereka dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan perubahan nyata. Secara terstruktur pemerintah harus mencoba memasukkan para pemilih muda dalam proses pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka untuk memiliki lebih banyak suara dalam tindakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Partai politik dan pemerintah dapat mempromosikan partisipasi secara elektronik dalam politik, termasuk diskusi online, asosiasi visual, dan ruang obrolan politik. Pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong partisipasi politik pemilih pemula sehingga mereka merasakan kenyamanan, aksesibilitas, menciptakan mekanisme baru untuk mengatur asosiasi, dan menyampaikan informasi tanpa intervensi dari pemerintah.

**Kesimpulan**

Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2019 terkait media yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi pemula sebesar 100% menggunakan platform media digital dimana untuk mengetahui calon presiden dan untuk menambah pengetahuan dasar politik sebesar 80%. Namun, keputusan pemilihan presiden didukung media presiden ternyata menunjukkan tidak pernah sebesar 57.6%.

**Daftar Pustaka**

Amirullah dan Budiono, Harris. 2013. Pengantar Manajemen. Edisi Ketiga Penerbit Graha Ilmu.

Henn, Matt, Mark Weinstein, and Dominic Wring. 2002. “A Generation Apart? Youth and Political Participation in Britain.” British Journal of Politics and International Relations, Vol. 4(2):167– 92 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2005. “Uninterested Youth? Young People’s Attitudestowards Party Politics in Britain.” Political Studies, Vol. 53: 556– 57 (2005

Fukuyama, Francis., Sosial Capital; Civil Society and Development, Third World Quarterly, Vol 22. (2001)

Machfiroh, Runik. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital. Disertasi PKn UPI tidak diterbitkan.

M. Rusli Karim. 1991. Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Norris, Pippa. 2003. ‘Young People and Political Activism: From the Politics of Loyalties to the Politics ofChoice?’, Paper presented to the Council of Europe Symposium, Young People and Democratic Institutions: From Disillusionment to Participation, Strasbourg, 27 – 28 November.

Sanders, Luk. (2013)"Keyakinan Aneh dari Alexis de Tocqueville: Kristen sebagai Filsafat". *International Journal of Philosophy and Theology* , 74: 1 (2013): 33–53. (2013),

Suhartono. 2009. Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Baseddemocracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat). UPI. Bandung

Sutanyo, AMA dan Machfiroh R. (2016), Political Marketing Activity In Simultaneous Regional Elections 2015. Jurnal MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan 33 (1), 99-106

Tapscott.2010.The Politics of Youthful Antipolitics: Representing the ‘Issue’ ofYouth Participation in Politics, Journal of Youth Studies, Vol. 13 (2): 181-195 (2010)

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 ayat 34 <https://news.idntimes.com/indonesia/linda/pilkada-2018-10-juta-pemilih-pemula-terancam-tak-bisa-memilih->[1/full](https://news.idntimes.com/indonesia/linda/pilkada-2018-10-juta-pemilih-pemula-terancam-tak-bisa-memilih-1/full)diunduh tanggal 4 Januari 2019.

[http://ldfebui.org/wp-content/uploads/2017/08/BN-06-2017.pdf ,](http://ldfebui.org/wp-content/uploads/2017/08/BN-06-2017.pdf) diunduh 4 Januari 2019.